

EDISI REVISI

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN 2010 - 2014



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

DESEMBER 2011

KATA PENGANTAR

Memasuki periode pembangunan jangka menengah 2010-2014, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010-2014. Sesuai dengan ketentuan maka proses penyusunannya melalui proses teknokratis yaitu analisis secara cermat dari aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan, proses politik yaitu mengacu pada rencana pembangunan nasional dan rencana strategis Kementerian Pertanian. Selain itu juga melalui proses kebijakan dengan mengikutsertakan seluruh komponen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pada saat proses penyusunan Renstra tengah berlangsung, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menerbitkan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Di dalamnya ditekankan bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga diharapkan sudah mengimplementasikan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah, sesuai dengan amanat UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk itu perlu dilakukan penataan program dan kegiatan disertai dengan kejelasan sasaran pembangunan, indikator kinerja, dan penanggung jawab program/kegiatan; penyediaan indikasi kebutuhan pendanaan jangka menengah untuk proyeksi ketersediaan anggaran; dan pemantapan proses perencanaan dan penganggaran sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara perencanaan dan penganggaran sejak penyusunan RPJMN.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2010-2014 telah memuat bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain yang menggambarkan proses penyusunannya. Bagian-bagian tersebut adalah: Pendahuluan; Visi, Misi dan Nilai-Nilai; Analisis Lingkungan Strategis baik Internal maupun Eksternal; Tujuan, dan Sasaran; dan berbagai kegiatan kurun waktu 2010 – 2014 menuju Swasembada Daging Sapi dan Kerbau. Di dalamnya juga dicantumkan strategi operasional, pendanaan dan indikator kinerja untuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

Semoga dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat bagi aparat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Jakarta, Desember 2011

Direktur Jenderal,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum.....	2
B. Potensi dan Permasalahan	5
BABII. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
A. Visi	13
B. Misi.....	14
C. Tujuan	14
D. Sasaran.....	15
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian	16
B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	17
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Program	20
B. Kegiatan.....	20
BAB V. PEMBIAYAAN.....	24
BAB VI. INDIKATOR KINERJA	27
BAB VII. PENUTUP	28
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produksi Daging, Telur dan Susu.....	3
Tabel 2. Perkembangan Volume Impor Ternak dan Hasil Ternak Tahun 2005 – 2009	4
Tabel 3. Pembiayaan Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010 – 2014	24
Tabel 4. Investasi dan PDB Pembangunan Peternakan 2010 – 2014.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sasaran Populasi Sapi Potong Tahun 2010 – 2014	30
Lampiran 2. Sasaran Populasi Sapi Perah Tahun 2010 – 2014	31
Lampiran 3. Sasaran Populasi Kerbau Tahun 2010 – 2014.....	32
Lampiran 4. Sasaran Populasi Kambing Tahun 2010 – 2014	33
Lampiran 5. Sasaran Populasi Domba Tahun 2010 – 2014.....	34
Lampiran 6. Sasaran Populasi Babi Tahun 2010 – 2014	35
Lampiran 7. Sasaran Populasi Ayam Buras Tahun 2010 – 2014.....	36
Lampiran 8. Sasaran Populasi Itik Tahun 2010 – 2014.....	37
Lampiran 9. Sasaran Produksi Daging Tahun 2010 – 2014.....	38
Lampiran 10. Sasaran Produksi Daging Sapi Tahun 2010 – 2014.....	39
Lampiran 11. Sasaran Produksi Daging Kerbau Tahun 2010 – 2014	40
Lampiran 12. Sasaran Produksi Daging Kambing Tahun 2010 – 2014.....	41
Lampiran 13. Sasaran Produksi Daging Domba Tahun 2010 – 2014	42
Lampiran 14. Sasaran Produksi Daging Babi Tahun 2010 – 2014.....	43
Lampiran 15. Sasaran Produksi Daging Ayam Buras Tahun 2010 – 2014...	44
Lampiran 16. Sasaran Produksi Daging Itik Tahun 2010 – 2014	45
Lampiran 17. Sasaran Produksi Telur Tahun 2010 – 2014	46
Lampiran 18. Sasaran Produksi Susu Tahun 2010 – 2014	47
Lampiran 19. Kebutuhan Pembiayaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan Tahun 2010 - 2014.....	48
Lampiran 20. Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010 – 2014	49

BAB I PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan organisasi Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Peternakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian disebutkan bahwa Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya mencakup fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian.

Kementerian Pertanian terdiri atas 13 organisasi termasuk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri. Tugas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, sedangkan fungsinya adalah: (i) Merumuskan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; (ii) Melaksanakan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; (iii) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; (iv) Memberi bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; (v) Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dari fungsi tersebut struktur organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas : (i) Sekretariat Direktorat Jenderal, (ii) Direktorat Perbibitan Ternak, (iii) Direktorat Pakan Ternak, (iv) Direktorat Budidaya Ternak, (v) Direktorat Kesehatan Hewan dan (vi) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen. Masing-masing tugas dan fungsi Direktorat adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria serta memberi bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknis direktoratnya. Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oleh karena itu Sekretariat Direktorat Jenderal menangani perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum, evaluasi dan pelaporan, dan penanganan kelompok jabatan fungsional.

Secara umum fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyusun kebijakan di bidang produksi ternak dan kesehatan hewan. Fungsi-fungsi produksi mencakup kebijakan di bidang perbibitan, pakan, dan budidaya ternak sedangkan fungsi kesehatan hewan mencakup kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Khususnya untuk penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan hewan, pendekatan kesehatan semesta (*One World One Health*) digunakan dalam rangka mengkaitkan kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas-tugas kebijakan produksi ternak dan kesehatan hewan tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan akan berkoordinasi dengan Kementerian di bidang perekonomian dan Kementerian yang terkait dengan kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya perubahan organisasi Direktorat Jenderal Peternakan menjadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum di atas, maka sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen strategik dilakukan revisi terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2010-2014 yang sebelumnya telah disusun.

A. Kondisi Umum

1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program Dan Kegiatan 5 Tahun Yang Lalu

Kondisi umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan standarisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan pada aspek ekonomi, aspek teknis, dan aspek fungsional. Pertumbuhan tersebut merupakan kinerja dari kebijakan yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Peternakan selama kurun waktu 2007 – 2010 berdasarkan *road map* yang telah ditetapkan. Dari aspek makro ekonomi, pertumbuhan PDB peternakan selama kurun waktu 2007 - 2009 mencapai 3,1% sedangkan dari aspek impor dan ekspor, neraca perdagangan komoditas peternakan masih menunjukkan defisit yang tinggi. Pada kurun waktu yang sama kesempatan kerja yang dapat diserap dari hasil pembangunan peternakan berjumlah 3,4 juta orang atau mengalami peningkatan sebesar 3,83%.

Untuk aspek teknis, seluruh jenis ternak mengalami peningkatan kecuali kerbau dan ayam buras yang masing-masing mengalami penurunan 1,7% dan 1,69%. Produksi peternakan juga mengalami

peningkatan yaitu daging mengalami kenaikan sebesar 2,3%; telur 8,6%; dan susu 14,1%. Peningkatan produksi ini menambah penyediaan daging yang siap dikonsumsi menjadi sebesar 1,5 juta ton atau 85,3% dari yang ditargetkan sebesar 1,8 juta ton. Telur terealisasi 1,3 juta ton atau 81,4% dari yang ditargetkan sebesar 1,4 juta ton. Penyediaan susu terealisasi 69,7% dari target sebesar 1,8 juta ton. Berdasarkan gambaran tersebut di atas realisasi penyediaan protein hewani asal ternak untuk masyarakat pada tahun 2010 adalah 5,8 gr/kap/hr.

Keberhasilan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi untuk menggerakkan aset yang ada di masyarakat tidak terlepas dari perumusan kebijakan fungsional di bidang perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

2. Pemenuhan Kebutuhan Pangan Hewani Asal Ternak

Aspirasi masyarakat dalam pembangunan peternakan khususnya melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan hewani asal ternak, dan kebutuhan untuk industri. Aspirasi masyarakat untuk pemenuhan tersebut diatur dalam beberapa kebijakan dan regulasi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pemenuhan konsumsi masyarakat untuk pangan hasil ternak dapat ditunjukkan dari hasil produksi ternak yaitu daging, telur dan susu yang meningkat sejak tahun 2005-2009 seperti disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Produksi Daging, Telur dan Susu

No	Jenis Produk	Tahun (Ton)				
		2006	2007	2008	2009	Rata-rata
1	DAGING	2,062.9	2,069.5	2,136.6	2,204.9	2,118.48
2	TELUR	1,204.4	1,382.1	1,323.6	1,300.4	1,302.63
3	SUSU	616.5	567.7	647.0	827.2	664.60

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pemenuhan konsumsi masyarakat disediakan melalui produksi daging (berbagai jenis ternak) sebesar 2,1%, telur 1,3% dan susu 0,6%. Disamping dipenuhi dari produksi dalam negeri juga diperlukan import produk peternakan yang berasal dari bahan pangan, bahan selain pangan dan obat hewan.

Perkembangan volume impor ternak dan hasil ternak disampaikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Perkembangan Volume Impor Ternak Tahun 2005 - 2009

NO	Jenis komoditi/commodities	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
I	Ternak					
1	Bahan pangan					
2	Bahan selain pangan					
	a. Sapi bibit	4.6	6.2	0.1	1.3	0.1
	b. Sapi bakalan	256.2	265.7	414.2	570.1	229154.6
	c. Babi bibit	-	-	-	-	-
	d. DOC bibit(PS)	234.7	122.6	233.6	-	22
	e. DOC bibit(FS)	3.0	-	-	-	0
	f. Unggas	0.3	26.3	31.5	0.0	203.47
	g. Kuda	-	-	-	-	0
	h. Kambing	-	0.2	8.5	-	21
II	Hasil ternak					
1	Bahan pangan					
	a. Daging	64,315.2	70,626.3	87,490.0	100,473.4	112,710.97
	'-sapi	21,484.5	25,949.2	39,400.0	45,708.5	67,390.13
	'-kambing/Domba	829.6	711.8	570.9	698.5	861.58
	'-babi	3,279.2	3,918.6	2,609.7	214.2	162.92
	'-unggas	3,978.4	3,468.4	4,675.2	7,495.1	867.38
	'-hati sapi	34,436.4	36,107.7	40,203.4	5,776.0	1,314.27
	'-hati/jeroan lainnya	307.1	470.6	30.8	40,581.1	42,114.69
	b. produk susu	173,084.4	188,128.4	198,216.8	180,932.8	173,305.30
	c. mentega	60,175.6	73,420.0	79,924.0	16,607.9	24,595.19
	d. keju	9,882.7	10,612.3	13,959.5	10,603.6	13,486.83
	e. telur komsumsi	707.0	943.9	1,156.9	1,299.0	1,184.16
	f. yogurt	169.0	713.3	1,481.6	500.5	264.72
2	Bahan selain pangan					
	Non material food					
	a. Telur Tetas(ton)	19.5	55.2	55.2	131.7	0
	b. Kulit(ooo lbr)	51,818.6	46,357.3	46,357.3	55,929.2	224,451.08
	c. obat hewani (ton)	456.0	3,510.1	3,510.1	10,872.2	3,514.16
	d. bulu bebek (ton)	944.4	1,322.3	1,254.2	188.9	7869.21
	e. tulang/tanduk (ton)	64.9	2.5	1.1	0.1	1.09
	f. wol,limbah wol dan bulu halus(ton)	1,161.2	1,729.4	1,257.1	5,053.6	4,060.37
	g. semen(ton)	17.4	50.1	185.8	0.1	0,09

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa impor hasil ternak menduduki peringkat pertama sedangkan impor ternak menduduki peringkat kedua diikuti dengan bahan selain pangan.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Analisis Lingkungan Internal

Dalam menyusun kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, prinsip yang digunakan adalah bagaimana mengkombinasikan seluruh aset nasional termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dikemas dalam suatu perencanaan yang baik sehingga suatu negara mampu memproduksi ternak secara mandiri dan memiliki daya saing di pasar internasional. Potensi modal dasar dalam negeri tersebut di atas memang bukan elemen statis di dalam suatu masyarakat tetapi elemen dinamis yang terus bergerak melalui campur tangan manusia. Dalam menganalisis faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicermati dari aspek *kekuatan (strengths)* dan *kelemahan (weaknesses)*.

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan saat ini telah dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memberi kewenangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk merumuskan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- 2) Adanya kelembagaan di berbagai aspek produksi dan kesehatan hewan, teknologi yang memadai, sarana dan prasarana, serta regulasi yang cukup lengkap. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum yang adil juga telah dimiliki.
- 3) Indonesia memiliki ternak asli yang merupakan SDG seperti sapi Bali, sapi Peranakan Ongole (PO), sapi Sumba Ongole (SO), sapi Madura, sapi Aceh, sapi Pesisir, dan sapi Persilangan hasil inseminasi buatan merupakan kekuatan yang dimiliki. Untuk ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba, keberadaannya banyak di masyarakat seperti kambing Kacang, Peranakan Etawah, kambing Boer, domba Ekor Gemuk, domba Ekor Tipis, dan domba Garut. Untuk ternak babi, sedikitnya dikategorikan dalam dua kelompok yaitu babi lokal dan babi eks impor, yang hampir semuanya dipelihara masyarakat. Untuk ternak unggas lokal khususnya ayam buras, sedikitnya terdapat 31 bangsa atau populasi yang tersebar di wilayah nusantara. Seluruh ternak lokal seperti disebutkan di atas merupakan plasma nutfah yang

masih dapat dikembangkan sehingga dapat meningkatkan populasi, produksi, dan reproduktifitasnya.

- 4) Potensi lahan sebagai sumber pakan hijauan sebesar 74,8 juta ha dan potensi hasil samping produk pertanian/perkebunan/perikanan yang melimpah sebagai sumber bahan pakan ternak.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

Berbagai kelemahan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan ditandai dengan :

- 1) Belum dimilikinya perangkat hukum yang terkait dengan pemberian insentif dan fasilitasi kelompok peternak dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau Penetapan Presiden serta peraturan perundangan lainnya. Belum optimalnya fungsi kelembagaan, rendahnya dukungan institusi lain yang terkait dalam mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya penerapan standar mutu bibit, kurang terkendalinya persilangan ternak asli, lokal, dan eksotik juga merupakan sisi kelemahan.
- 2) Dilihat dari komposisi dan kualifikasi pendidikan aparatur, masih ditemukan suatu keadaan yang belum seimbang dan belum sesuai di beberapa strata pendidikan. Sementara pola pembinaan dan pengembangan karier belum jelas. Analisis jabatan juga belum diterapkan. Sistem kesejahteraan pegawai belum memadai. Tidak adanya instansi vertikal di daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di daerah kurang berjalan secara optimal. Ini tercermin dari masih adanya tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah.
- 3) Dari aspek pengawasan, kualitas, kuantitas dan transparansi kinerja unit operasional yang dapat menunjang tercapainya tujuan rencana strategis serta *good governance* masih lemah.
- 4) Dari aspek teknis, kelemahan yang menghambat pembangunan Peternakan dan kesehatan hewan antara lain proses produksi yang sebagian besar masih tergantung pada impor (misalnya sapi perah, ayam ras petelur dan pedaging) serta belum mantapnya program perbibitan ternak sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam lokal, dan itik. Kelemahan lainnya adalah produksi dan produktifitas *ternak yang* masih di bawah kinerja yang diharapkan. Selain itu, pada umumnya wilayah perbibitan, budidaya dan pembesaran belum dipetakan sehingga belum mampu membentuk satu kesatuan

agribisnis yang terintegrasi dalam satu kawasan. Masalah pemberantasan penyakit hewan juga masih belum tertangani dengan baik terutama penyakit-penyakit yang bersifat sporadis dan belum mampu dibebaskan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Dalam menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dicermati dari aspek peluang (*opportunity*) dan aspek hambatan/ancaman (*threats*).

a. Aspek Peluang (*opportunity*)

- 1) Letak Indonesia yang berada pada posisi geostrategik dalam perdagangan dunia memberikan peluang untuk meningkatkan akses pasar barang ekspor Indonesia ke pasar global.
- 2) Kekayaan sumber daya alam berupa lahan pertanian yang ditunjang iklim tropis basah memungkinkan kontinuitas pasokan komoditas peternakan. Lahan pertanian yang begitu luas akan menciptakan peluang bagi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk meningkatkan investasi dalam pengolahan produk bernilai tinggi, yang didukung oleh jumlah penduduk sebagai pasar potensial.
- 3) Meningkatnya permintaan produk peternakan dalam negeri dan ekspor, potensi sumber daya bahan pakan dan pakan lokal, potensi sumber daya genetik ternak lokal, berkembangnya usaha pendukung peternakan, berkembangnya pertanian organik dan biofuel, semakin bersanya minat investasi di bidang peternakan.
- 4) Adanya pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan melalui anggaran belanja Pemerintah Daerah, meningkatnya tuntutan *One World One Health* (Kesehatan Semesta) untuk kesehatan manusia, hewan dan lingkungan, dan adanya pengaturan perwilayahan peternakan. Perkembangan teknologi informasi perdagangan juga akan berdampak ganda (*multiplier effect*) bagi dunia usaha peternakan.
- 5) Peluang ekspor komoditas ternak misalnya ternak kambing dan domba ke Timur Tengah dan negara tetangga. Demikian juga untuk obat hewan, dan produk susu serta unggas lokal.

b. Aspek Hambatan/Ancaman (*threats*)

- 1) Pembangunan peternakan dihadapkan pada lemahnya kerjasama terutama di sektor produksi, transportasi, dan jasa. Perdagangan

produk peternakan secara ilegal, menurunnya fungsi kelembagaan di daerah, tingginya konversi serta kompetisi lahan peternakan merupakan ancaman serius. Selain itu dukungan dari instansi terkait masih belum optimal. Kebijakan pusat dan daerah serta kebijakan antar sektor yang masih tumpang tindih mengakibatkan kurangnya kepastian berusaha yang akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

- 2) Paradigma otonomi daerah menjadi faktor signifikan yang harus dipertimbangkan dalam menyusun suatu kebijakan. Pemberian otonomi ke daerah pada dasarnya memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah guna meningkatkan pembangunan daerah salah satunya dalam produksi peternakan.
- 3) Liberalisasi perdagangan dunia yang terus berlangsung akan menciptakan peluang dan sekaligus ancaman bagi Indonesia. Di satu sisi liberalisasi perdagangan dunia meningkatkan peluang pasar di luar negeri bagi produk ekspor peternakan Indonesia, namun di sisi lain akses produk impor peternakan ke pasar dalam negeri untuk barang atau bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri merupakan sebuah ancaman. Untuk itu perkembangan liberalisasi harus disikapi secara proporsional sehingga tidak merugikan kepentingan Indonesia.
- 4) Pembentukan blok perekonomian yang terus berlangsung sampai saat ini seperti ASEAN-CHINA *Free Trade Agreement* akan mempengaruhi perekonomian nasional. Dampak positif yang diperoleh apabila suatu negara menjadi anggota blok perekonomian adalah kemudahan akses dan penetrasi pasar, berkurangnya hambatan dan investasi serta menguatnya posisi tawar ekonomi dalam menarik mitra dagang dan investasi asing. Di sisi lain, dampak negatif yang dihadapi oleh suatu negara yang tidak menjadi anggota adalah adanya hambatan akses pasar global karena negara anggota blok perekonomian yang selama ini melakukan hubungan dagang akan mengalihkan permintaan barang dan jasa ke negara sesama anggota blok perekonomian. Sebagai akibatnya setiap negara harus menciptakan tingkat efisiensi paling optimal sehingga mempunyai daya saing tinggi di pasar global.
- 5) Munculnya raksasa ekonomi baru seperti China, di satu sisi merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas serta menganeekaragamkan produk ekspor untuk tujuan China. Kemudian

munculnya negara-negara yang bertumpu pada ekspor seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand merupakan tekanan terhadap produk peternakan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Oleh karena itu perlu dicermati bagaimana dan sejauh mana peluang dan ancaman tersebut di atas mempengaruhi perkembangan pembangunan peternakan di Indonesia.

- 6) Adanya perubahan iklim global menyebabkan hilangnya kesempatan tanaman untuk berproduksi. Kemarau yang berkepanjangan akan menyebabkan penurunan produktivitas sumber pakan, sawah kering, petani tidak panen dan presipitasi yang berlebihan (erosi, banjir dan pencucian unsur hara). Serangan hama dan penyakit tanaman akan meningkat frekuensi dan intensitasnya. Perubahan iklim juga menyebabkan tanaman gagal dalam membentuk bunga dan biji, sehingga menurunkan produksi tanaman. Akibatnya adalah adanya kelangkaan ketersediaan bahan pakan dan pakan hijauan dan peningkatan harga. Perubahan iklim akan sangat berpengaruh pada produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) yang limbahnya digunakan sebagai pakan serta produksi hijauan dari padang penggembalaan (pastura).
- 7) Tuntutan pasar akan mutu pakan ternak semakin tinggi, akibat munculnya berbagai kasus seperti penyakit Anthrax, penyakit sapi gila (Madcow) di Amerika Serikat, serta kasus AI. Salah satu cara untuk mencegah hewan ternak terkontaminasi dari berbagai penyakit tersebut adalah dengan pemberian pakan ternak yang sudah di sertifikasi sehingga aman dikonsumsi dan mengandung formulasi yang dapat memaksimalkan potensi genetiknya. Penyusunan formulasi pakan harus memperhatikan aspek keamanan pangan, karena pakan yang berkualitas akan meningkatkan produksi pangan hasil ternak (daging, telur, dan susu) yang akan dikonsumsi oleh manusia. Penggunaan senyawa fisik, kimia, biologi pada pakan tidak boleh membahayakan kesehatan ternak dan manusia. Penggunaan feed additive yang berbahaya bagi kesehatan manusia seperti hormon dan antibiotika tertentu dilarang karena dapat menjadi residu pada bahan pangan hasil ternak. Penggunaan bahan pakan yang berasal dari organisme transgenik harus diperhatikan sebab dapat menjadi GMO (*Genetically Modified Organism*) pada pangan hasil ternak yang berbahaya bagi konsumen.
- 8) Saat ini banyak terjadi pergeseran fungsi lahan dari padang penggembalaan umum dan atau lahan pertanian yang menghasilkan hasil samping atau limbah untuk pakan ternak,

berubah fungsinya menjadi lahan untuk pertambangan, hutan industri, pemukiman atau perkebunan, dan hal ini akan menyebabkan menurunnya kapasitas tampung ternak. Beberapa data menampilkan penurunan fungsi tersebut, misalnya di Sulawesi Selatan tercatat terjadi penurunan 23.13% selama kurun waktu 10 tahun (1996-2005) dari luasan 236.434 ha menjadi tinggal 192.008 ha (Jasmal, 2004). Luasan padang penggembalaan di NTT pada tahun 1998 tercatat 1.8 juta ha (BPS, 2000) namun hasil citra landsat Departemen Kehutanan tahun 2002 mencatat luasan 793 ribu ha. Kapasitas tampung rata-rata kurang dari 0,25 - 1,0 ST/ha/tahun.

3. Dukungan Instansi Terkait

Kementerian Dalam Negeri

- a. Kebijakan terhadap Perda khususnya penghapusan retribusi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi berkembangnya produk peternakan.
- b. Koordinasi program yang difasilitasi oleh Dana Konsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan program yang didanai APBN.

Kementerian Perdagangan

- a. Kebijakan penetapan aturan non-tariff komoditas peternakan impor.
- b. Menjamin efisiensi distribusi pangan dan sarana produksi.
- c. Penataan kerjasama pemasaran internasional di negara tujuan ekspor.
- d. Penyederhanaan prosedur ekspor-impor yang mendukung peningkatan harga produk segar dan produk olahan hasil peternakan.
- e. Mengantisipasi gejolak harga pangan menjelang musim kemarau dan hari-hari besar.
- f. Pengawasan perdagangan illegal.
- g. Pengendalian efektifitas pemberlakuan regulasi pemasukan ternak dan produk ternak.
- h. Penyebaran informasi perkembangan harga-harga komoditas peternakan di tingkat usaha peternakan dan pusat-pusat pemasaran.

Kementerian Perindustrian

Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah yang memproduksi barang modal dan sarana produksi yang mendukung produksi primer, olahan pangan, dan non-pangan komoditas peternakan.

Kementerian Perhubungan

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan sarana perhubungan (darat dan laut) untuk kelancaran arus transportasi perdagangan sarana produksi dan komoditas peternakan dari dan ke sentra produksi.
- b. Pengaturan rasionalisasi tarif angkutan komoditas peternakan baik di tingkat lokal, antar pulau maupun internasional.

Kementerian BUMN

- a. Pemanfaatan dana CSR dari BUMN untuk bidang peternakan
- b. Pengembangan sistem integrasi kelapa sawit dan sapi potong (SISKA)
- c. Mendorong pengembangan sub sistem perbibitan oleh swasta/BUMN
- d. Dukungan penggunaan pupuk organik asal ternak

Kementerian Kehutanan

Penetapan lahan hutan yang siap untuk dikonversi menjadi lahan peternakan serta pemberian kemudahan pelepasan kawasan budidaya yang diperuntukkan untuk perluasan areal peternakan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Kebijakan peningkatan keterampilan transmigran dan calon transmigran di bidang peternakan.
- b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berprofesi di bidang peternakan (penyuluh, pengamat hama, pengawas benih/bibit, penangkar benih/bibit, dan inseminator).

Kementerian Koperasi dan UKM

- a. Kebijakan penataan, pengembangan kelembagaan usaha peternakan menjadi kelembagaan koperasi yang berbasis pada usaha pengolahan, pemasaran dan perdagangan.
- b. Fasilitasi dan peningkatan akses pembiayaan yang dibutuhkan UKM yang berbasis usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan.

Kementerian Pendidikan Nasional

- a. Kebijakan untuk mendidik anak usia dini untuk mengenal dan mencintai lingkungan hidup dan kebanggaan terhadap produk peternakan dalam negeri.
- b. Peningkatan gizi anak sekolah yang diantaranya difasilitasi dana BOS untuk pemberian makanan tambahan dengan aneka produk peternakan dan bahan pangan lokal.

Kementerian Kesehatan

Kebijakan untuk membina dan melindungi peternak dan masyarakat melalui proses produksi bersih dan pemeliharaan keamanan lingkungan dari penyakit zoonosis.

Kementerian Luar Negeri

Kebijakan untuk mengoptimalkan peran KBRI sebagai ujung tombak *market intelligence* pemasaran produk peternakan di pasar internasional serta promosi, diplomasi, dan kerjasama perdagangan produk peternakan dengan Negara tujuan ekspor.

Kementerian Agama

Kebijakan untuk mengoptimalkan peranserta pemuka agama dalam rangka memasyarakatkan program percontohan pembangunan peternakan di masyarakat.

Kementerian Riset dan Teknologi

Kebijakan untuk mengkoordinasikan teknologi untuk mempertajam prioritas penelitian, memperkuat kapasitas kelembagaan, menciptakan iklim inovasi, dan membentuk SDM yang handal dalam penelitian dan pengembangan peternakan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal

- a. Kebijakan untuk menyediakan informasi tentang investasi komoditas peternakan sentra produksi ternak yang terdapat di berbagai daerah
- b. Kebijakan pemberian insentif investasi bagi penanam modal langsung industri primer dan olahan produk peternakan.

Badan Pertanahan Nasional

- a. Kebijakan untuk mencegah dan menekan laju konversi lahan peternakan ke non-peternakan.
- b. Penetapan status penguasaan lahan peternakan.
- c. Perwujudan dan perlindungan lahan peternakan secara berkelanjutan diantaranya melalui penataan administrasi pertanahan untuk mempermudah sertifikasi lahan bagi peternak.

Perguruan Tinggi

- a. Mengembangkan jurusan yang relevan dengan upaya menyiapkan mahasiswa untuk menjadi pelopor pembangunan peternakan di pedesaan.
- b. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan di daerah melalui pengabdian masyarakat serta meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi peternakan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jangka panjang dirumuskan sebagai berikut :

"Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak".

Visi tersebut mengandung 6 (enam) kata kunci yang merupakan pernyataan keinginan yang mencerminkan mimpi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Keenam kata kunci tersebut yakni: (1) profesional; (2) berdaya saing; (3) berkelanjutan; (4) sumber daya lokal; (5) penyediaan dan keamanan pangan hewani; dan (6) kesejahteraan peternak.

Profesional, berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.

Peternakan yang berdaya saing, berarti peternakan yang mampu menghasilkan luaran berkualitas unggul secara kompetitif dan komparatif.

Peternakan yang berkelanjutan, mengandung arti bahwa peternakan mampu eksis dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis dengan menggunakan sumber daya terbarukan.

Sumber daya lokal, diartikan sebagai sumber daya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang meliputi sumber daya genetik (ternak, pakan, *master seed*/biang vaksin) dan teknologi peternakan yang sesuai dengan kondisi agroekosistem maupun sosial ekonomi di Indonesia.

Penyediaan dan keamanan pangan hewani, diartikan sebagai upaya untuk mencapai (1) kecukupan ketersediaan pangan hewani; (2) stabilitas ketersediaan pangan hewani; (3) keamanan pangan dari produk peternakan berkualitas yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

Kesejahteraan peternak, diartikan sebagai kemampuan peternak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan daya saing produksi dan produk peternakan dengan pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak
3. Meningkatkan profesionalitas dan integritas penyelenggaraan administrasi publik.

Visi dan misi tersebut dilandaskan pada nilai-nilai budaya kerja sebagai suatu ukuran yang mengandung kebenaran/kebaikan mengenai keyakinan dan perilaku organisasi yang dianut. Nilai budaya ini digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Nilai-nilai budaya kerja tersebut adalah dipegangnya komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Implementasi nilai-nilai budaya tersebut memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan dan kesehatan hewan yang memiliki integritas dan profesionalitas dalam bidangnya. SDM tersebut juga harus memiliki kreatifitas dan kepekaan yang dinamis kearah efesiensi dan efektivitas. Untuk itu, dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, setiap penyelenggara organisasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas, tegas, dan seimbang.

C. Tujuan

Bersinergi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam periode tahun 2010-2014, adalah merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis sumber daya lokal, dalam rangka :

1. Meningkatkan produksi ternak dan produk peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing.
2. Mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.

3. Menyediakan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa peranan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis untuk dapat mendorong pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selain aktor-aktor lainnya yaitu para peternak dan kelompok peternak, pengusaha swasta, akademisi, dan perbankan.

D. Sasaran

Sasaran utama program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah memfasilitasi meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani, meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak dan tersedianya daging sapi/kerbau domestik sebesar minimal 90 persen dari total kebutuhan nasional. Secara lebih rinci, sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

1. Penerbitan kebijakan dan NSPK di bidang: perbibitan; budidaya ternak; pakan ternak; pelayanan kesehatan hewan; pelayanan kesmavet dan pascapanen; serta pelayanan publik.
2. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.
3. Tercapainya peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal;
4. Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal;
5. Terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis;
6. Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan;
7. Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Arah kebijakan Kementerian Pertanian mencakup:

- a. Penguatan kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat dan rekrutmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan.
- b. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula melalui peningkatan produksi secara berkelanjutan.
- c. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan industri gula
- d. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor.
- e. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional.
- f. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan
- g. Pembangunan kawasan komoditas terpadu secara vertikal dan/atau horizontal melalui konsolidasi usaha tani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal dan internasional
- h. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional.

2. Strategi Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan tugas pembangunan pertanian selama periode 2010-2014, strategi yang ditempuh Kementerian Pertanian mengacu pada penerapan tujuh Gema Revitalisasi, yaitu : (i) Revitalisasi Lahan; (ii) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan; (iii) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana; (iv) Revitalisasi Sumber Daya Manusia; (v) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (vi) Revitalisasi Kelembagaan Petani, serta (vii) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.

Ketujuh Gema Revitalisasi pembangunan tersebut juga menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memfasilitasi program dan kegiatan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010 – 2014.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai bagian dari 12 program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengemban satu program nasional yaitu Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

1. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional seperti dituangkan dalam RPJMN 2010 – 2014 khususnya dalam hal pembangunan Ketahanan Pangan sesuai hasil KTT Pangan 2009. Untuk itu, pemerintah harus menjamin pelaksanaan langkah-langkah mendesak pada tingkat nasional, regional, dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Developmet Goal* (MDGs) yaitu: *pro poor, pro growth, pro job*; dan pelestarian lingkungan hidup.

Dengan mengacu pada RPJMN, arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2010 – 2014 adalah untuk: (i) menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak; (ii) meningkatkan populasi dan produktifitas ternak; (iii) meningkatkan produksi pakan ternak; (iv) meningkatkan status kesehatan hewan; (v) menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; dan (vi) meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kebijakan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak akan diarahkan untuk: (i) mengoptimalkan kelembagaan perbibitan dan sertifikasi; (ii) pemwilayahan sumber bibit berbasis potensi dan agroekosistemnya; (iii) pengembangan kawasan/sentra sumber bibit; (iv) pelestarian sumber daya genetik secara berkelanjutan; (v) peningkatan penerapan teknologi perbibitan; dan (vi) pengembangan usaha dan investasi perbibitan

Dalam aspek populasi dan produktifitas ternak diarahkan untuk : (i) meningkatkan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia dan non ruminansia ; (ii) melaksanakan revitalisasi persusuan; (iii) melaksanakan restrukturisasi perunggasan; dan (iv) pengembangan kelembagaan dan usaha.

Pada aspek produksi pakan ternak diarahkan untuk: (i) menambah penyediaan pakan dan air; (ii) mengembangkan teknologi dan industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal; (iii) meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan; serta (iv) pengembangan dan pemanfaatan lahan kehutanan.

Pada aspek kesehatan hewan diarahkan untuk : (i) meningkatkan perlindungan hewan, pengamatan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan; (ii) meningkatkan pelayanan kesehatan hewan; (iii) meningkatkan kualitas dan kuantitas obat hewan; (iv) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner.

Pada aspek keamanan produk hewan akan diarahkan untuk ; (i) menguatkan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner; (ii) meningkatkan jaminan produk hewan yang ASUH dan daya saing produk hewan; (iii) meningkatkan penerapan kesrawan; (iv) mengoptimalkan pengaturan stock daging; dan (v) mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran daging sapi.

Selanjutnya, pada aspek peningkatan peran dan fungsi kelembagaan diarahkan untuk : (i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan; (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat; (iii) meningkatkan kerjasama internasional; (iv) meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, data dan informasi; (v) meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

2. Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2010 – 2014 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan peternakan sesuai dengan target empat sukses Kementerian Pertanian yaitu Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Dalam mencapai target tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu pada kesepakatan *General Agreement on Tarif and Trade (GATT)* yang diwadahi oleh WTO, dengan salah satu kesepakatannya memuat *agreement on agriculture*, termasuk didalamnya terkait perjanjian *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* dan *Technical Barrier to Trade (TBT)* seperti yang tertuang dalam UU No 7 Tahun 2004. Prinsip perjanjian tersebut pada intinya adalah bahwa produk dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan keamanan (*safety*), standard mutu (*quality*), kesejahteraan hewan (*animal welfare*), ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Memperhatikan target empat sukses Kementerian Pertanian, salah satunya adalah Pencapaian Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan perjanjian GATT tersebut di atas, strategi yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2010 – 2014 yaitu :

1. Memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi distribusi.
2. Meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
3. Memperkuat regulasi untuk mendorong peran peternak dalam negeri sehingga menjadi mandiri..
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait serta *networking* antar daerah.
5. Meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor.
6. Memperkuat kelembagaan peternakan di semua lapisan dan otoritas veteriner.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Penyusunan program mengacu kepada Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan (Buku 1) dari Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (Kementerian Keuangan dan Bappenas, 2009). Program disusun dalam kerangka strategi nasional dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Program harus dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Salah satu program nasional yang pelaksanaannya dilakukan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah **"Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal"**.

Outcome yang diharapkan dari program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah (i) Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu); (ii) Meningkatnya kontribusi ternak lokal dalam penyediaan pangan hewani (daging, telur, susu); (iii) Meningkatnya ketersediaan protein hewani berkualitas asal ternak; dan (iv) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Dalam restrukturisasi program dan kegiatan, setiap unit kerja Eselon II memiliki akuntabilitas kinerja untuk satu kegiatan. Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disinergikan dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Eselon II di bawahnya (Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Budidaya Ternak, Direktorat Pakan Ternak, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, dan Sekretariat Direktorat Jenderal). Di samping itu, untuk menunjang kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yaitu dalam produksi daging sapi, maka terdapat satu program yang mencakup enam kegiatan dalam menunjang tupoksinya yaitu:

Kegiatan 1: Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras, itik, babi) yang bersertifikat melalui: (a) penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan *Good Breeding Practices*, peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak; (b) peningkatan penerapan teknologi perbibitan, dan (c) pengembangan usaha dan investasi. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah (a) peningkatan kuantitas semen, (b) peningkatan produksi embrio, (c) peningkatan kualitas dan kuantitas bibit sapi potong, (d) peningkatan kualitas dan kuantitas sapi perah, (e) peningkatan kualitas dan kuantitas ayam buras, (f) peningkatan kualitas dan kuantitas itik, (g) peningkatan kualitas dan kuantitas kambing, serta (h) peningkatan kualitas dan kuantitas domba.

Kegiatan 2: Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah meningkatnya populasi dan produksi ternak. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah (a) pertumbuhan populasi dan produksi ternak ruminansia (sapi potong, sapi perah, domba dan kambing), (b) meningkatnya proporsi produksi susu sapi domestik terhadap total permintaan susu nasional, (c) pertumbuhan populasi dan produksi ayam buras dan itik, dan (d) proporsi produksi telur ayam buras terhadap total produksi telur nasional, serta (e) proporsi produksi daging unggas lokal terhadap total produksi daging unggas nasional.

Kegiatan 3: Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah (a) berkembangnya usaha pakan dan bahan pakan, (b) meningkatnya pemanfaatan hijauan pakan yang berkualitas, (c) berkembangnya unit usaha pengolahan pakan, (d) meningkatnya mutu pakan dan terjaminnya keamanan pakan, serta (e) meningkatnya pelayanan di bidang pakan.

Kegiatan 4: Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis. Output kegiatan ini adalah (a) penguatan kelembagaan kesehatan hewan, (b) pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis, (c) perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik, serta (d) terjaminnya mutu obat hewan. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah (a) kemampuan mempertahankan status "daerah bebas" PMK dan BSE dan peningkatan status wilayah yang bebas penyakit menular. (b) penguatan otoritas veteriner melalui pertumbuhan jumlah Puskesmas yang terfasilitasi, (c) penguatan otoritas veteriner melalui pertumbuhan jumlah laboratorium veteriner kabupaten/kota yang terfasilitasi, (d) surveilans nasional PHMSZE (prevalensi dan atau insidensi), dan (e) ketersediaan alat, mesin, dan obat hewan bermutu.

Secara teknis, kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan tersebut meliputi :

1. Perlindungan hewan, melalui: a). Analisis dan manajemen risiko importasi hewan, produk hewan, bahan genetik, bahan biologik, dan media pembawa penyakit hewan, b). Kerjasama internasional dalam peningkatan kesehatan hewan global dan harmonisasi standar *sanitary and phytosanitary* (SPS), c). Peningkatan kesiagaan terhadap kejadian penyakit, dan d). Peningkatan adopsi biosekuriti oleh unit usaha peternakan/pemeliharaan hewan dan rantai pasar.
2. Pengamatan penyakit hewan, melalui, a). Monitoring dan surveilans penyakit hewan menular strategis, b). Investigasi wabah penyakit hewan menular, c). Deteksi penyakit hewan eksotik dan *emerging*, d) Pelaporan penyakit hewan dan pengembangan sistem informasi kesehatan hewan, e). Pengembangan kemampuan laboratorium diagnostik penyakit hewan, f) Pengembangan epidemiologi partisipatori untuk deteksi dan respon cepat penyakit hewan (PDSR) dan g). Analisis epidemiologi dan ekonomi veteriner.
3. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis termasuk zoonosis, melalui a). Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis, b). Tanggap darurat wabah penyakit hewan, c). Peningkatan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, d). Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengendalian dan penanggulangan PHMS dan Zoonosis, e). Kerjasama lintas sektoral dalam pengendalian dan penanggulangan PHMS dan Zoonosis, f). Peningkatan pelayanan kesehatan unggas komersial skala kecil (PVUK) untuk mendukung pemberantasan Avian Influenza
4. Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan, melalui a) Penguatan kelembagaan otoritas veteriner, b). Peningkatan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), c). Peningkatan kompetensi dokter hewan dan paramedik veteriner, d). Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dalam mendukung program percepatan swasembada saging sapi dan kerbau (PSDSK), dan e). Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dalam hal penanganan kesehatan reproduksi ternak.
5. Pengawasan Obat Hewan dan Alsin Kesehatan Hewan melalui: a). Penjaminan ketersediaan obat hewan berkualitas, b) Pengawasan peredaran obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan, c). Peningkatan kualitas penerapan cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) oleh produsen obat hewan, d). Peningkatan jumlah tenaga pengawas obat hewan, dan e). Fasilitasi pelayanan bidang obat hewan dalam rangka ekspor.

Kegiatan 5: Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. Output kegiatan ini adalah (a) penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner, (b) peningkatan jaminan produk hewan yang ASUH bagi yang dipersyaratkan dan daya saing produk hewan, (c) meningkatkan penjaminan produk hewan non pangan (d) tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan (e) tersedianya profil keamanan produk hewan nasional dan peta zoonosis, serta (f) peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah (a) peningkatan kualitas penerapan fungsi otoritas veteriner, UPT pelayanan, dan laboratorium veteriner, (b) pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan, (c) persentase penurunan produk asal hewan yang di atas BMCM dan BMR, (d) penurunan prevalensi dan atau insidensi zoonosis, (e) peningkatan persentase jumlah RPH yang menerapkan kesrawan, (f) peningkatan persentase jumlah RPU yang menerapkan kesrawan.

Kegiatan 6: Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang peternakan. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah indeks kepuasan pelanggan.

BAB V PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan melalui tugas pokok dan fungsi, diperlukan pembiayaan untuk mencapai misi, visi, tujuan, dan sasaran organisasi. Pembiayaan tersebut digunakan untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi sesuai dengan fungsi di bidang perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen. Selain itu, juga diperlukan pembiayaan untuk melancarkan semua fungsi perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan monitoring evaluasi sebagai fungsi manajemen pembangunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pembiayaan program pembangunan peternakan diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit berbagai kegiatan yang ada di masyarakat dan aset yang dimiliki masyarakat. Pembiayaan kegiatan pembangunan peternakan yang dirinci berdasarkan fungsi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pembiayaan Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010-2014

NO	Fungsi	Eselon II	Besarnya Anggaran (Rp milyar)					Total
			2010	2011	2012	2013	2014	
1	Perbibitan	Direktorat Perbibitan	147,50	934,13	1.016,60	1.041,29	1.168,01	4.307,52
2	Budidaya	Direktorat Budidaya	348,17	597,20	823,41	864,39	900,85	3.534,01
3	Pakan	Direktorat Pakan	51,12	72,63	132,88	179,84	191,47	627,94
4	Kesehatan Hewan	Direktorat Keswan	187,10	230,49	362,11	377,95	412,41	1.570,06
5	Kesmavet dan Pasca Panen	Direktorat Kesmavet dan Pasca Panen	68,80	68,80	111,44	200,00	243,05	692,10
6	Pelayanan Prima	Sekretariat	137,40	341,43	152,44	195,30	222,87	1.049,45
Total			940,08	2.244,69	2.598,88	2.858,77	3.138,66	11.781,08

Berdasarkan Tabel di atas, selama kurun waktu 2010 – 2014, kebutuhan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebesar Rp. 11,8 triliun. Berdasarkan fungsinya, fasilitasi fungsi budidaya dan perbibitan cukup besar karena adanya kegiatan antara lain LM3 dan SMD serta kegiatan Insentif dan Penyelamatan Betina Produktif yang cukup besar.

Alokasi penganggaran yang tersedia untuk masing-masing fungsi diharapkan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan PDB peternakan, menumbuhkan, dan menggaet investasi serta, yang tak kalah penting membuka kesempatan lapangan kerja baru sampai tahun 2014.

Pertumbuhan subsektor peternakan dapat dihitung melalui Pendapatan Domestik Bruto (PDB) subsektor peternakan yang merupakan hasil dari seluruh nilai-tambah proses produksi peternakan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan hal tersebut, dapat diperoleh korelasi antara investasi dan PDB yang dapat diukur melalui besaran investasi yang diperlukan untuk menghitung besaran PDB yang diinginkan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

Investasi (I) adalah penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi (subsektor peternakan dan kesehatan hewan) atas keterlibatannya dalam proses produksi dengan harapan akan memperoleh manfaat (*benefit*) pada masa-masa yang akan datang. Investasi tersebut diperlukan sebagai sumber pembiayaan proses produksi peternakan dan pendorong laju pertumbuhan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan (*growth*) serta menjaga keberlanjutan proses produksi peternakan.

Adapun pertumbuhan PDB investasi dan kesempatan kerja yang timbul dari stimulus pembiayaan disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 . Investasi dan PDB Pembangunan Peternakan 2010-2014

No	Parameter	Tahun					r (%/th)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	PDB (Rp trilyun)						
	Harga Konstan	32,04	33,65	35,12	36,67	38,33	4,58
	Harga Berlaku	66,52	73,19	80,05	87,58	95,93	9,58
	Kenaikan % (H. konstan)	3,62	5,03	4,37	4,41	4,53	
	Kenaikan % (H. berlaku)	8,62	10,03	9,37	9,41	9,53	
2	ICOR	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
3	Investasi (Rp trilyun)	7,91	11,92	11,38	12,58	14,12	17,26
	1). Pemerintah	0,79	1,19	1,14	1,26	1,41	
	2). Swasta dan Masyarakat	7,12	10,73	10,24	11,32	12,71	
4	Kesempatan Kerja (juta orang)	3,19	3,31	3,44	3,56	3,70	3,75
	Tambahan TK (000 orang)	104,46	112,72	128,87	124,96	139,64	7,74

Keterangan :

- Harga konstan didasarkan kepada yang berlaku pada tahun 2000
- Investasi pemerintah diasumsikan 10% dari total investasi yang berasal dari masyarakat, swasta dan pemerintah
- Kesempatan kerja didasarkan pada pertumbuhan ternak

Berdasarkan angka-angka pada Tabel 4 kebutuhan investasi untuk pembangunan peternakan pada tahun 2010-2014 adalah sebesar Rp 57,91 triliun. Dari kebutuhan tersebut, pemerintah diharapkan berinvestasi Rp 5,79 triliun dalam kurun waktu yang sama, dan sisanya dibebankan kepada masyarakat dan swasta. Dengan kebutuhan investasi tersebut, maka akan dapat tercapai pertumbuhan pembangunan peternakan sebesar 4,58% atas dasar harga konstan dan 9,58% atas dasar harga berlaku.

Mempertimbangkan perhitungan tersebut, diharapkan populasi ternak sapi potong setiap tahunnya meningkat 5,20%, kerbau 0,71%, sapi perah 4,62%, kambing 4,36%, domba 5,54%, babi 1,15%, kuda 0,49%, ayam buras 3,25%, ayam ras petelur 2,22%, ayam ras pedaging 2,91%, dan itik 3,71%. Sedangkan produksi daging meningkat per tahunnya sebesar 4,25%, telur 4,42%, dan susu 9,74%.

Berdasarkan asumsi produksi dan populasi di atas, ditargetkan peningkatan konsumsi pada lima tahun ke depan adalah 5,25% per tahun untuk daging, 3,79% per tahun untuk telur, dan 7,16% per tahun untuk susu. Melalui program PSDSK 2014, berdasarkan kondisi peternakan domestik saat ini, maka impor sapi bakalan dapat dikurangi secara bertahap sampai hanya sebesar 161,94 ribu ekor dan impor daging 23,05 ribu ton pada tahun 2014.

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang dapat berupa *output*, *outcome* dan *impact*. *Output* merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian *outcome* program. Dalam struktur manajemen kinerja, *output* merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat eselon II yaitu Direktorat Teknis dan Sekretariat Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sehingga rumusan *output* kegiatan merupakan kriteria yang mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi eselon II sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. *Output* tersebut harus dapat mendukung pencapaian *outcome* program dan dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. *Outcome* dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat eselon I A, sehingga kriteria rumusan *outcome* dapat mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi eselon I A sesuai dengan visi, misi, dan tugas pokok dan fungsinya. *Outcome* program harus dapat mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Secara skematis indikator kinerja utama program dan kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menggerakkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit, produksi ternak, produksi pakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis, dan penjaminan pangan asal hewan yang berprinsip aman, sehat, utuh, dan halal, serta dukungan manajemen untuk semua kegiatan sebagaimana disajikan pada Lampiran 20.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan RPJMN.

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010 – 2014 merupakan panduan bagi pimpinan untuk menghasilkan rancangan program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan telah disusunnya dokumen Rencana Strategis tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan standard dan penyusunan rencana kerja sehingga penjabaran rencana kerja setiap tahunnya akan lebih mudah dilaksanakan. Dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam setiap perencanaan program dan kegiatannya, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tingkatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) masih dimungkinkan mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan akibat adanya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Menyadari bahwa pencapaian pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tidak mudah, maka hanya dengan tekad dan integritas para penyelenggara negara di Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, disertai dengan intensitas koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait, maka tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan akan dapat dicapai.

Lampiran 1. Sasaran Populasi Sapi Potong Tahun 2010 – 2014

(ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	451.269	474.411	488.455	502.033	515.853
2	Sumut	528.146	555.230	589.981	625.807	663.635
3	Sumbar	318.834	335.184	352.070	369.158	386.974
4	Riau	155.859	163.851	175.957	188.806	202.733
5	Jambi	116.880	122.874	127.980	133.064	138.315
6	Sumsel	240.138	252.452	265.583	278.906	292.821
7	Bengkulu	96.479	101.427	106.925	112.524	118.385
8	Lampung	724.207	761.345	798.458	835.909	874.890
9	DKI Jakarta	1.649	1.733	1.335	1.094	934
10	Jabar	412.406	433.555	458.863	484.796	512.062
11	Jateng	1.889.111	1.985.989	2.083.783	2.186.825	2.294.366
12	DI Yogyakarta	366.159	384.937	405.420	426.243	448.019
13	Jatim	4.609.121	4.845.486	5.109.087	5.352.694	5.608.511
14	Bali	621.536	653.410	687.537	722.177	758.365
15	N T B	668.665	702.955	768.603	838.906	915.401
16	N T T	758.782	797.694	817.636	838.077	859.029
17	Kalbar	149.356	157.016	164.091	171.184	178.538
18	Kalteng	53.282	56.014	58.945	61.920	65.029
19	Kalsel	135.224	142.158	150.326	158.684	167.463
20	Kaltim	88.479	93.017	98.854	104.873	111.230
21	Sulut	84.601	88.939	93.905	98.975	104.290
22	Sulteng	224.915	236.449	244.802	253.004	261.414
23	Sulsel	959.385	1.008.585	1.083.264	1.162.085	1.245.039
24	Sultra	208.393	219.079	232.270	245.822	260.097
25	Maluku	72.126	75.824	78.646	81.430	84.291
26	Papua	79.751	83.841	87.788	91.759	95.885
27	Babel	7.540	7.926	8.300	8.677	9.068
28	Banten	45.728	48.073	50.813	53.616	56.558
29	Gorontalo	179.257	188.449	199.466	210.757	222.628
30	Malut	59.319	62.361	64.936	67.499	70.145
31	Kepri	16.905	17.771	18.610	19.454	20.331
32	Papua Barat	40.427	42.501	44.858	47.263	49.784
33	Sulbar	71.001	74.643	78.398	82.197	86.158
	Jumlah	14.434.927	15.175.179	15.995.946	16.816.218	17.678.242

Lampiran 2. Sasaran Populasi Sapi Perah Tahun 2010 – 2014

(ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	30	31	33	34	36
2	Sumut	875	907	947	993	1.048
3	Sumbar	477	495	516	542	571
4	Riau	168	174	182	190	201
5	Jambi	79	82	86	90	95
6	Sumsel	150	156	163	171	180
7	Bengkulu	238	247	258	270	285
8	Lampung	196	203	212	223	235
9	DKI Jakarta	2.660	2.759	2.880	3.021	3.187
10	Jabar	136.474	141.547	147.753	155.026	163.507
11	Jateng	146.183	151.617	158.265	166.055	175.140
12	DI Yogyakarta	3.435	3.563	3.719	3.902	4.115
13	Jatim	288.855	299.594	312.730	328.123	346.074
14	Bali	136	141	147	154	162
15	N T B	18	18	19	20	21
16	N T T	36	37	39	41	43
17	Kalbar	217	226	235	247	260
18	Kalteng	-	-	-	-	-
19	Kalsel	107	111	116	122	128
20	Kalim	31	32	34	35	37
21	Sulut	21	22	23	24	26
22	Sulteng	8	8	8	9	9
23	Sulse	1.648	1.709	1.784	1.872	1.974
24	Sultra	-	-	-	-	-
25	Maluku	-	-	-	-	-
26	Papua	11	11	12	12	13
27	Babel	116	120	126	132	139
28	Banten	19	19	20	21	22
29	Gorontalo	8	8	8	9	9
30	Malut	-	-	-	-	-
31	Kepri	-	-	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-	-
33	Sulbar	13	13	14	14	15
	Jumlah	582.207	603.852	630.326	661.353	697.534

Lampiran 3. Sasaran Populasi Kerbau Tahun 2010 – 2014

(ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	131.200	132.099	132.844	133.863	134.398
2	Sumut	114.034	114.815	115.733	116.659	117.593
3	Sumbang	100.086	100.772	101.510	102.369	102.954
4	Riau	37.632	37.890	38.193	38.498	38.806
5	Jambi	46.431	46.749	46.983	47.218	47.454
6	Sumsel	29.078	29.277	29.511	29.747	29.985
7	Bengkulu	19.924	20.061	20.161	20.262	20.363
8	Lampung	33.050	33.276	33.543	33.811	34.081
9	DKI Jakarta	192	193	194	195	196
10	Jabar	129.798	130.688	132.556	134.406	136.395
11	Jateng	75.505	76.022	76.402	76.784	77.168
12	DI Yogyakarta	1.202	1.211	1.227	1.245	1.262
13	Jatim	32.632	32.855	33.020	33.185	33.351
14	Bali	2.176	2.191	2.222	2.253	2.284
15	N T B	105.156	105.876	106.103	106.330	107.393
16	N T T	149.680	150.705	152.212	153.781	155.366
17	Kalbar	3.166	3.188	3.191	3.194	3.197
18	Kalteng	6.476	6.521	6.553	6.619	6.751
19	Kalsel	23.790	23.953	24.072	24.313	24.799
20	Kaltim	8.016	8.071	8.111	8.192	8.356
21	Sulut	-	-	-	-	-
22	Sulteng	3.264	3.286	3.302	3.336	3.402
23	Sulse	96.289	96.949	97.046	97.143	97.240
24	Sultra	2.486	2.503	2.506	2.508	2.511
25	Maluku	17.529	17.649	17.666	17.684	17.702
26	Papua	1.236	1.245	1.246	1.247	1.248
27	Babel	222	223	223	223	224
28	Banten	122.868	123.710	124.452	125.199	125.950
29	Gorontalo	13	13	13	13	13
30	Malut	861	867	872	877	883
31	Kepri	14	14	14	14	14
32	Papua Barat	1	1	1	1	1
33	Sulbar	8.094	8.149	8.157	8.166	8.174
	Jumlah	1.302.100	1.311.021	1.319.842	1.329.336	1.339.516

Lampiran 4. Sasaran Populasi Kambing Tahun 2010 – 2014

(ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	729.715	756.806	784.903	814.043	844.265
2	Sumut	626.139	632.401	638.725	645.112	651.563
3	Sumbar	237.700	247.111	256.895	267.066	277.640
4	Riau	260.044	270.445	281.263	292.514	304.214
5	Jambi	285.302	299.567	314.545	330.272	346.786
6	Sumsel	404.319	408.362	412.446	416.570	420.736
7	Bengkulu	154.293	160.465	166.884	173.559	180.501
8	Lampung	1.053.213	1.095.342	1.139.155	1.184.722	1.232.110
9	DKI Jakarta	5.048	5.098	5.149	5.201	5.253
10	Jabar	1.547.679	1.609.586	1.673.969	1.740.928	1.810.565
11	Jateng	3.490.385	3.676.184	3.915.660	4.162.851	4.472.521
12	DI Yogyakarta	322.095	334.979	348.378	362.313	376.806
13	Jatim	2.889.562	3.002.554	3.119.964	3.241.965	3.368.737
14	Bali	65.666	68.949	72.397	76.017	79.817
15	N T B	555.251	583.014	612.165	642.773	674.912
16	N T T	566.974	587.427	608.617	630.571	653.318
17	Kalbar	146.013	151.853	157.928	164.245	170.814
18	Kalteng	47.702	49.610	51.595	53.658	55.805
19	Kalsel	124.070	129.033	134.194	139.562	145.144
20	Kaltim	61.584	62.200	62.822	63.450	64.085
21	Sulut	45.211	45.663	46.119	46.581	47.046
22	Sulteng	300.201	315.211	330.971	347.520	364.896
23	Sulsel	446.098	457.370	468.927	480.776	492.925
24	Sultra	127.046	132.128	137.413	142.910	148.626
25	Maluku	183.666	187.339	191.086	194.908	198.806
26	Papua	40.020	40.420	40.825	41.233	41.645
27	Babel	10.421	10.942	11.489	12.064	12.667
28	Banten	897.248	942.111	989.216	1.038.677	1.090.611
29	Gorontalo	91.501	92.416	93.340	94.274	95.216
30	Malut	103.988	109.187	114.647	120.379	126.398
31	Kepri	24.554	25.537	26.558	27.620	28.725
32	Papua Barat	14.355	15.072	15.826	16.617	17.448
33	Sulbar	253.647	266.329	279.646	293.629	308.311
	Jumlah	16.110.710	16.770.712	17.503.717	18.264.579	19.108.914

Lampiran 5. Sasaran Populasi Domba Tahun 2010 – 2014

(ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	192.147	199.833	207.826	216.140	264.785
2	Sumut	275.919	283.565	291.423	299.499	347.799
3	Sumbar	5.897	6.009	6.123	6.240	6.358
4	Riau	6.605	6.869	7.144	7.430	7.727
5	Jambi	58.976	60.851	62.785	64.781	66.840
6	Sumsel	33.477	33.812	34.150	34.492	34.837
7	Bengkulu	4.573	4.619	4.665	4.712	4.759
8	Lampung	83.903	86.420	89.012	91.683	94.433
9	DKI Jakarta	1.830	1.848	1.867	1.886	1.904
10	Jabar	5.634.694	5.937.388	6.206.135	6.530.258	6.860.863
11	Jateng	2.655.950	2.751.300	2.873.278	3.022.339	3.173.945
12	DI Yogyakarta	138.078	142.220	146.486	150.881	164.341
13	Jatim	748.074	755.554	825.291	913.600	1.002.736
14	Bali	67	70	73	75	78
15	N T B	31.051	32.293	33.585	34.928	36.325
16	N T T	65.409	67.143	68.924	70.752	72.628
17	Kalbar	-	-	-	-	-
18	Kalteng	4.932	5.051	5.173	5.297	5.425
19	Kalsel	3.541	3.576	3.612	3.648	3.685
20	Kaltim	979	1.002	1.026	1.050	1.075
21	Sulut	-	-	-	-	-
22	Sulteng	8.347	8.680	9.028	9.389	9.764
23	Sulse	816	824	832	841	849
24	Sultra	207	209	211	213	215
25	Maluku	18.951	19.709	20.497	21.317	22.170
26	Papua	128	130	131	132	133
27	Babel	133	138	144	150	156
28	Banten	662.555	739.905	844.501	928.281	1.015.413
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Malut	-	-	-	-	-
31	Kepri	-	-	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-	-
33	Sulbar	-	-	-	-	-
	Jumlah	10.637.237	11.149.019	11.743.923	12.420.013	13.199.245

Lampiran 6. Sasaran Populasi Babi Tahun 2010 – 2014

(ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	289	285	281	274	268
2	Sumut	693.960	710.960	730.736	754.828	779.825
3	Sumbar	12.379	12.579	12.803	13.060	13.324
4	Riau	64.740	66.326	68.170	70.418	72.750
5	Jambi	15.385	15.203	14.966	14.623	14.290
6	Sumsel	35.828	36.706	37.727	38.971	40.261
7	Bengkulu	1.115	1.102	1.085	1.060	1.036
8	Lampung	53.878	53.241	52.413	51.212	50.045
9	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
10	Jabar	4.693	4.808	4.942	5.105	5.274
11	Jateng	168.945	170.131	171.311	172.350	173.421
12	DI Yogyakarta	8.500	8.708	8.951	9.246	9.552
13	Jatim	14.291	14.203	14.079	13.879	13.685
14	Bali	860.321	848.586	833.533	812.092	791.315
15	N T B	43.325	44.386	45.621	47.125	48.686
16	N T T	1.431.120	1.449.511	1.469.666	1.491.779	1.514.439
17	Kalbar	423.637	434.015	446.087	460.795	476.054
18	Kalteng	388.672	398.194	409.270	422.763	436.763
19	Kalsel	5.495	5.629	5.786	5.977	6.175
20	Kaltim	85.562	84.551	83.235	81.327	79.475
21	Sulut	334.100	341.884	350.904	361.827	373.141
22	Sulteng	184.322	187.376	190.814	194.777	198.851
23	Sulsel	711.399	716.775	722.208	727.190	732.310
24	Sultra	35.367	40.258	46.849	56.597	68.383
25	Maluku	151.713	155.430	159.753	165.020	170.485
26	Papua	483.434	477.170	469.095	457.521	446.297
27	Babel	107.647	110.284	113.352	117.089	120.967
28	Banten	6.902	7.072	7.268	7.508	7.756
29	Gorontalo	12.196	12.495	12.842	13.265	13.705
30	Malut	59.054	60.501	62.183	64.234	66.361
31	Kepri	232.105	229.363	225.793	220.619	215.593
32	Papua Barat	53.957	55.279	56.817	58.690	60.633
33	Sulbar	197.375	198.954	200.568	202.089	203.650
	Jumlah	6.881.706	6.951.965	7.029.107	7.113.310	7.204.768

Lampiran 7. Sasaran Populasi Ayam Buras Tahun 2010 – 2014

(ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	9.630.616	9.823.228	10.019.693	10.169.988	10.322.538
2	Sumut	11.988.732	12.228.507	12.473.077	12.660.173	12.850.076
3	Sumbar	4.978.409	5.077.978	5.179.537	5.257.230	5.336.089
4	Riau	5.188.596	5.292.368	5.398.215	5.479.189	5.561.376
5	Jambi	4.785.291	4.928.849	5.076.715	5.229.016	5.385.887
6	Sumsel	7.997.073	8.236.985	8.484.095	8.611.356	8.740.527
7	Bengkulu	1.939.294	1.978.080	2.017.642	2.047.906	2.078.625
8	Lampung	12.021.332	12.381.972	12.753.431	12.992.258	13.252.103
9	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
10	Jabar	30.809.476	31.233.760	32.483.111	32.970.358	33.629.765
11	Jateng	50.467.829	51.734.204	54.237.861	55.042.235	55.831.352
12	DI Yogyakarta	4.332.337	4.592.277	4.867.814	5.013.848	5.164.264
13	Jatim	25.526.532	26.199.207	27.247.175	27.655.883	28.209.001
14	Bali	4.794.803	5.034.543	5.286.270	5.497.721	5.717.629
15	N T B	4.996.241	5.246.053	5.508.356	5.728.690	5.957.837
16	N T T	10.786.839	11.218.312	11.779.228	12.132.605	12.617.909
17	Kalbar	7.186.882	7.618.095	8.075.181	8.478.940	8.902.887
18	Kalteng	8.485.742	8.994.886	9.534.579	10.011.308	10.511.874
19	Kalsel	14.320.886	15.466.557	16.703.882	17.539.076	18.416.029
20	Kaltim	4.515.309	4.650.768	4.790.291	4.934.000	5.082.020
21	Sulut	2.212.130	2.278.494	2.346.849	2.417.254	2.489.772
22	Sulteng	3.252.831	3.448.001	3.654.881	3.837.625	4.029.506
23	Sulsel	14.993.519	15.443.324	15.906.624	16.224.757	16.549.252
24	Sultra	9.138.923	9.595.869	10.075.663	10.579.446	11.108.418
25	Maluku	2.835.955	3.006.112	3.186.479	3.345.803	3.513.093
26	Papua	1.463.326	1.492.592	1.522.444	1.545.281	1.568.460
27	Babel	4.332.617	4.549.248	4.776.710	4.967.779	5.166.490
28	Banten	11.235.286	11.797.051	12.386.903	12.882.379	13.397.675
29	Gorontalo	1.216.323	1.277.139	1.340.996	1.408.045	1.478.448
30	Malut	1.680.962	1.781.820	1.888.729	1.983.165	2.082.324
31	Kepri	790.572	814.290	838.718	863.880	889.796
32	Papua Barat	921.977	977.295	1.035.933	1.098.089	1.163.974
33	Sulbar	2.976.506	3.036.037	3.096.757	3.143.209	3.190.357
	Jumlah	281.803.146	291.433.901	303.973.838	311.748.490	320.195.350

Lampiran 8. Sasaran Populasi Itik Tahun 2010 – 2014

(ekor)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	2.354.145	2.377.687	2.401.464	2.425.478	2.449.733
2	Sumut	3.625.923	3.770.960	3.921.799	4.078.671	4.241.818
3	Sumbar	1.046.703	1.088.571	1.132.114	1.177.398	1.224.494
4	Riau	354.888	358.437	362.021	365.641	369.298
5	Jambi	584.478	590.323	596.226	602.188	608.210
6	Sumsel	1.869.510	1.888.205	1.907.087	1.926.158	1.945.420
7	Bengkulu	150.608	152.114	153.635	155.172	156.723
8	Lampung	472.132	476.853	481.621	486.438	491.302
9	DKI Jakarta	39.094	39.485	39.880	40.279	40.681
10	Jabar	7.176.838	7.220.576	7.454.361	7.896.467	8.778.931
11	Jateng	4.632.643	4.725.296	4.819.802	4.916.198	5.014.522
12	DI Yogyakarta	446.509	473.300	501.698	531.799	563.707
13	Jatim	2.887.147	3.031.504	3.183.079	3.342.233	3.509.345
14	Bali	760.970	774.645	788.566	802.737	817.162
15	N T B	534.677	553.057	572.068	591.732	612.073
16	N T T	260.985	268.709	276.661	284.848	293.277
17	Kalbar	456.878	475.153	494.160	513.926	534.483
18	Kalteng	385.502	404.777	425.016	446.267	468.580
19	Kalsel	3.959.735	4.118.124	4.282.849	4.454.163	4.632.330
20	Kaltim	162.711	164.338	165.981	167.641	169.318
21	Sulut	95.306	100.072	105.075	110.329	115.846
22	Sulteng	211.788	213.906	216.045	218.205	220.387
23	Sulsel	1.077.822	1.120.935	1.165.772	1.212.403	1.260.899
24	Sultra	390.963	410.511	431.037	452.589	475.218
25	Maluku	303.375	321.578	340.872	361.325	383.004
26	Papua	79.137	79.928	80.727	81.534	82.350
27	Babel	110.260	116.876	123.888	131.322	139.201
28	Banten	1.343.192	1.396.919	1.452.796	1.510.908	1.571.344
29	Gorontalo	81.194	85.254	89.517	93.993	98.692
30	Malut	50.080	52.584	55.213	57.974	60.872
31	Kepri	122.691	128.826	135.267	142.031	149.132
32	Papua Barat	15.579	15.735	15.892	16.051	16.212
33	Sulbar	1.907.222	2.021.655	2.142.955	2.271.532	2.407.824
	Jumlah	37.950.686	39.016.892	40.315.144	41.865.630	43.902.389

Lampiran 9. Sasaran Produksi Daging Tahun 2010 – 2014

(ton)

No	Provinsi/	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	51.794	53.433	55.631	58.286	61.343
2	Sumut	99.544	103.374	108.538	114.494	121.928
3	Sumbar	48.326	49.634	51.789	54.419	57.390
4	Riau	42.600	44.227	46.314	48.818	51.898
5	Jambi	23.608	24.342	25.234	26.264	27.852
6	Sumsel	47.537	49.400	51.571	53.965	57.477
7	Bengkulu	10.091	10.560	11.154	11.818	12.580
8	Lampung	66.146	69.449	73.655	78.377	83.951
9	DKI Jakarta	154.757	160.199	165.266	170.375	181.297
10	Jabar	476.944	485.383	495.512	506.707	529.250
11	Jateng	185.450	186.563	189.571	193.454	199.345
12	DI Yogyakarta	42.455	43.546	44.687	45.840	47.985
13	Jatim	417.197	421.444	429.090	437.322	447.847
14	Bali	32.244	32.406	32.933	33.660	34.538
15	N T B	50.683	51.694	53.032	54.550	56.065
16	N T T	31.085	32.517	34.633	37.324	40.601
17	Kalbar	44.792	46.788	49.215	52.042	55.999
18	Kalteng	23.551	25.232	27.217	29.373	32.116
19	Kalsel	51.078	52.658	54.253	55.867	59.106
20	Kaltim	47.068	47.489	48.132	48.935	50.361
21	Sulut	18.640	19.189	19.910	20.759	21.968
22	Sulteng	17.645	18.272	19.002	19.688	20.693
23	Sulsel	40.101	42.518	45.648	49.283	53.996
24	Sultra	20.317	20.698	21.183	21.564	22.045
25	Maluku	12.412	13.326	14.602	16.566	17.119
26	Papua	5.871	6.004	6.238	6.536	6.927
27	Babel	16.968	18.062	19.240	20.450	21.997
28	Banten	123.655	131.567	141.256	152.830	169.183
29	Gorontalo	7.827	8.504	9.425	10.540	11.905
30	Malut	18.737	27.810	42.046	53.880	73.467
31	Kepri	10.177	10.832	11.546	12.347	13.499
32	Papua Barat	5.187	5.633	6.218	6.914	7.768
33	Sulbar	8.027	8.531	9.199	9.999	10.966
	Jumlah	2.252.515	2.321.284	2.412.939	2.513.249	2.660.464

Lampiran 10. Sasaran Produksi Daging Sapi Tahun 2010 – 2014

(ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	9.221	10.141	11.600	13.503	15.737
2	Sumut	20.779	23.268	27.110	32.091	38.082
3	Sumbar	19.221	19.871	21.343	23.328	25.558
4	Riau	7.950	8.903	10.373	12.298	14.593
5	Jambi	4.320	4.536	4.951	5.498	6.119
6	Sumsel	11.526	11.884	12.730	13.876	15.162
7	Bengkulu	2.344	2.504	2.781	3.144	3.559
8	Lampung	13.635	15.268	17.789	21.090	25.027
9	DKI Jakarta	9.860	9.666	9.835	10.182	10.579
10	Jabar	80.204	78.111	78.948	81.198	83.808
11	Jateng	52.656	51.618	52.520	54.378	56.494
12	DI Yogyakarta	5.328	5.223	5.314	5.502	5.716
13	Jatim	99.494	99.484	103.131	108.977	115.622
14	Bali	9.744	9.714	10.054	10.589	11.188
15	N T B	8.129	8.421	9.064	10.029	11.010
16	N T T	10.394	11.639	13.560	16.077	19.078
17	Kalbar	8.647	9.682	11.281	13.374	15.871
18	Kalteng	6.260	7.009	8.167	9.682	11.490
19	Kalsel	6.609	6.397	6.424	6.565	6.734
20	Kaltim	8.261	8.139	8.325	8.665	9.048
21	Sulut	5.099	5.153	5.409	5.777	6.188
22	Sulteng	3.090	3.096	3.221	3.410	3.620
23	Sulsel	12.145	13.599	15.845	18.785	22.292
24	Sultra	4.093	4.013	4.083	4.227	4.392
25	Maluku	1.452	1.423	1.448	1.499	1.558
26	Papua	2.542	2.607	2.776	3.009	3.270
27	Babel	2.118	2.372	2.764	3.276	3.888
28	Banten	33.074	37.036	43.150	51.158	60.709
29	Gorontalo	3.696	4.138	4.821	5.716	6.783
30	Malut	1.429	1.616	1.902	2.278	2.730
31	Kepri	915	897	912	945	981
32	Papua Barat	2.036	2.280	2.657	3.150	3.738
33	Sulbar	2.037	2.281	2.657	3.150	3.739
	Jumlah	468.307	481.990	516.946	566.427	624.364

Keterangan :

Produksi yang dimaksud adalah produksi daging, tulang dan edible offal.

Lampiran 11. Sasaran Produksi Daging Kerbau Tahun 2010 – 2014

(ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	1.811	1.837	1.878	1.910	1.943
2	Sumut	9.147	9.276	9.488	9.652	9.835
3	Sumbar	2.146	2.176	2.224	2.275	2.313
4	Riau	1.705	1.729	1.767	1.798	1.816
5	Jambi	2.121	2.151	2.199	2.237	2.275
6	Sumsel	1.256	1.274	1.303	1.326	1.349
7	Bengkulu	511	519	531	541	552
8	Lampung	547	555	568	578	588
9	DKI Jakarta	38	39	41	42	43
10	Jabar	3.247	3.293	3.365	3.424	3.482
11	Jateng	2.430	2.465	2.519	2.563	2.606
12	DI Yogyakarta	8	8	8	8	8
13	Jatim	369	374	383	390	396
14	Bali	22	22	22	23	23
15	N T B	1.751	1.771	1.810	1.842	1.873
16	N T T	1.504	1.525	1.559	1.586	1.613
17	Kalbar	9	9	9	9	10
18	Kalteng	525	548	577	605	634
19	Kalsel	1.144	1.161	1.187	1.208	1.229
20	Kaltim	207	212	218	224	230
21	Sulut	-	-	-	-	-
22	Sulteng	31	31	32	33	33
23	Sulse	2.703	2.742	2.804	2.853	2.903
24	Sultra	55	56	58	59	61
25	Maluku	243	248	254	260	266
26	Papua	73	74	76	78	80
27	Babel	7	7	7	7	8
28	Banten	2.781	2.821	2.884	2.934	2.985
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Malut	-	-	-	-	-
31	Kepri	-	-	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-	-
33	Sulbar	136	189	263	365	506
	Jumlah	36.526	37.113	38.035	38.829	39.657

Lampiran 12. Sasaran Produksi Daging Kambing Tahun 2010 – 2014

(ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	1.789	1.986	2.208	2.449	2.596
2	Sumut	3.307	3.416	3.531	3.646	3.865
3	Sumbar	1.445	1.461	1.477	1.493	1.510
4	Riau	1.693	1.880	2.091	2.318	2.457
5	Jambi	605	671	747	828	918
6	Sumsel	1.664	1.682	1.701	1.720	1.738
7	Bengkulu	186	188	191	193	195
8	Lampung	7.175	7.964	8.857	9.821	10.890
9	DKI Jakarta	988	999	1.010	1.021	1.032
10	Jabar	7.220	7.300	7.382	7.462	7.543
11	Jateng	9.430	9.533	9.640	9.775	9.916
12	DI Yogyakarta	941	951	962	972	983
13	Jatim	15.239	15.455	15.675	15.810	16.053
14	Bali	1.358	1.459	1.569	1.683	1.806
15	N T B	273	282	292	301	311
16	N T T	2.925	3.021	3.123	3.225	3.418
17	Kalbar	498	515	532	550	568
18	Kalteng	609	629	650	672	694
19	Kalsel	417	431	446	460	475
20	Kaltim	565	572	579	586	594
21	Sulut	380	392	405	419	432
22	Sulteng	952	1.048	1.156	1.272	1.399
23	Sulse	761	845	940	1.042	1.155
24	Sultra	541	547	553	559	565
25	Maluku	820	829	839	848	857
26	Papua	135	150	167	185	206
27	Babel	43	48	53	59	65
28	Banten	5.078	5.637	6.269	6.952	7.708
29	Gorontalo	1.102	1.223	1.360	1.509	1.673
30	Malut	1.246	1.383	1.538	1.706	1.892
31	Kepri	179	198	220	244	271
32	Papua Barat	64	71	79	88	98
33	Sulbar	1.198	1.330	1.479	1.640	1.819
	Jumlah	70.827	74.096	77.722	81.507	85.700

Lampiran 13. Sasaran Produksi Daging Domba Tahun 2010 – 2014

(ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	184	202	218	234	252
2	Sumut	1,724	1,785	1,849	1,914	2,048
3	Sumbar	59	66	73	80	88
4	Riau	22	32	44	49	54
5	Jambi	158	164	169	174	180
6	Sumsel	2,273	2,500	2,693	2,900	3,074
7	Bengkulu	16	17	17	18	19
8	Lampung	327	342	354	366	379
9	DKI Jakarta	613	640	662	685	705
10	Jabar	26,523	27,053	27,887	28,525	30,379
11	Jateng	6,497	6,538	6,569	6,701	6,902
12	DI Yogyakarta	1,663	1,682	1,701	1,720	1,740
13	Jatim	12,960	13,418	13,869	14,285	15,264
14	Bali	-	-	-	-	-
15	N T B	65	72	79	86	94
16	N T T	544	571	592	614	638
17	Kalbar	-	-	-	-	-
18	Kalteng	3,776	4,153	4,473	4,696	4,931
19	Kalsel	46	50	53	56	60
20	Kaltim	13	14	14	15	15
21	Sulut	-	-	-	-	-
22	Sulteng	13	12	12	12	12
23	Sulsel	2	2	3	3	4
24	Sultra	-	-	-	-	-
25	Maluku	732	1,385	2,337	3,941	4,213
26	Papua	-	-	-	-	-
27	Babel	2	2	2	2	2
28	Banten	3,463	3,614	3,736	3,848	3,944
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Malut	-	-	-	-	-
31	Kepri	-	-	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-	-
33	Sulbar	-	-	-	-	-
	Jumlah	61,675	64,315	67,405	70,925	74,994

Lampiran 14. Sasaran Produksi Daging Babi Tahun 2010 – 2014

(ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh					
2	Sumut	30.766	31.074	31.385	31.699	32.016
3	Sumbar	485	487	488	490	492
4	Riau	1.409	1.641	1.912	2.227	2.595
5	Jambi	68	68	68	68	68
6	Sumsel	1.230	1.234	1.238	1.242	1.246
7	Bengkulu	101	115	130	147	167
8	Lampung	3.159	3.376	3.609	3.857	4.122
9	DKI Jakarta	12.598	12.640	12.682	12.724	12.766
10	Jabar	1.847	1.853	1.859	1.866	1.872
11	Jateng	2.154	2.161	2.168	2.175	2.182
12	DI Yogyakarta	79	80	80	80	80
13	Jatim	824	827	830	832	835
14	Bali	88.008	88.186	88.317	88.368	88.559
15	N T B	416	420	424	428	433
16	N T T	29.399	29.693	29.990	30.290	30.442
17	Kalbar	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522
18	Kalteng	3.455	3.512	3.571	3.630	3.691
19	Kalsel	342	393	452	519	597
20	Kaltim	2.058	2.081	2.104	2.128	2.152
21	Sulut	15.567	15.567	15.567	15.567	15.567
22	Sulteng	4.145	4.359	4.584	4.820	5.068
23	Sulsel	2.552	2.577	2.603	2.629	2.655
24	Sultra	925	928	931	934	937
25	Maluku	2.847	2.857	2.866	2.876	2.886
26	Papua	8.600	8.866	9.140	9.423	9.611
27	Babel	790	790	791	791	792
28	Banten	980	1.141	1.328	1.545	1.798
29	Gorontalo	67	67	67	67	67
30	Malut	31	31	32	32	32
31	Kepri	6.825	7.730	8.755	9.916	11.231
32	Papua Barat	2.656	3.055	3.513	4.040	4.646
33	Sulbar	754	863	987	1.130	1.293
	Jumlah	231.658	235.193	238.992	243.064	247.420

Lampiran 15. Sasaran Produksi Daging Ayam Buras Tahun 2010 – 2014

(bn)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	3.419	3.431	3.441	3.446	3.452
2	Sumut	20.062	20.776	21.402	21.689	22.064
3	Sumbar	5.424	5.617	5.787	5.864	5.966
4	Riau	2.681	2.777	2.861	2.899	2.949
5	Jambi	3.277	3.280	3.282	3.283	3.285
6	Sumsel	7.444	7.709	7.942	8.048	8.187
7	Bengkulu	1.697	1.758	1.811	1.835	1.867
8	Lampung	19.886	20.594	21.215	21.499	21.871
9	DKI Jakarta	6.126	6.562	6.958	7.145	7.392
10	Jabar	28.621	29.727	30.624	31.134	31.789
11	Jateng	35.885	36.013	36.316	36.365	36.428
12	DI Yogyakarta	7.527	7.795	8.030	8.138	8.278
13	Jatim	75.845	78.573	81.173	82.353	83.777
14	Bali	299	300	301	301	302
15	N T B	8.207	8.499	8.755	8.872	9.026
16	N T T	8.914	8.946	8.973	8.985	9.000
17	Kalbar	6.592	6.827	7.033	7.127	7.250
18	Kalteng	6.561	6.794	6.999	7.093	7.216
19	Kalsel	6.346	6.664	6.947	7.078	7.250
20	Kaltim	2.251	2.259	2.266	2.269	2.273
21	Sulut	2.195	2.202	2.209	2.212	2.216
22	Sulteng	5.007	5.274	5.512	5.623	5.769
23	Sulsel	12.117	12.548	12.927	13.100	13.327
24	Sultra	11.410	11.817	12.173	12.336	12.549
25	Maluku	341	341	342	342	342
26	Papua	995	995	996	996	996
27	Babel	8.875	9.349	9.772	10.068	10.330
28	Banten	9.690	10.034	10.337	10.476	10.657
29	Gorontalo	1.723	1.784	1.838	1.863	1.895
30	Malut	8.448	16.260	29.001	39.102	56.671
31	Kepri	676	695	712	719	729
32	Papua Barat	1.523	1.577	1.625	1.647	1.675
33	Sulbar	3.870	3.928	3.978	4.000	4.029
	Jumlah	323.933	341.705	363.536	377.907	400.806

Lampiran 16. Sasaran Produksi Daging Itik Tahun 2010 – 2014

(ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	819	823	826	830	835
2	Sumut	3.035	3.159	3.289	3.451	3.671
3	Sumbar	579	598	618	642	674
4	Riau	135	141	146	153	163
5	Jambi	168	168	169	170	171
6	Sumsel	686	714	744	780	830
7	Bengkulu	44	44	44	44	45
8	Lampung	42	42	42	43	43
9	DKI Jakarta	3.459	3.443	3.487	3.516	3.539
10	Jabar	4.478	4.632	4.852	5.104	5.401
11	Jateng	2.848	2.899	2.966	3.049	3.159
12	DI Yogyakarta	2.317	2.411	2.515	2.639	2.808
13	Jatim	1.408	1.422	1.436	1.453	1.476
14	Bali	170	171	171	171	172
15	N T B	301	314	327	343	365
16	N T T	91	94	97	100	105
17	Kalbar	72	75	78	82	87
18	Kalteng	393	409	426	447	475
19	Kalsel	1.410	1.468	1.528	1.604	1.706
20	Kaltim	115	115	116	116	117
21	Sulut	50	52	54	56	60
22	Sulteng	120	124	128	133	140
23	Sulsel	1.227	1.256	1.286	1.323	1.372
24	Sultra	195	225	261	310	385
25	Maluku	125	130	136	142	151
26	Papua	70	70	70	71	71
27	Babel	22	23	24	25	26
28	Banten	3.372	3.510	3.654	3.833	4.079
29	Gorontalo	44	45	47	50	53
30	Malut	21	22	23	24	26
31	Kepri	16	16	16	16	16
32	Papua Barat	9	9	9	10	11
33	Sulbar	715	732	750	771	801
	Jumlah	28.554	29.356	30.333	31.500	33.032

Lampiran 17. Sasaran Produksi Telur Tahun 2010 – 2014

(ton)

No	Provinsi	Tahun / Year				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	18.778	18.975	19.201	19.412	19.621
2	Sumut	99.249	101.537	104.316	106.568	108.926
3	Sumbar	61.299	63.366	65.539	67.772	69.685
4	Riau	8.956	9.280	9.624	9.977	10.278
5	Jambi	8.833	9.154	9.512	9.842	10.144
6	Sumsel	53.952	56.100	58.352	60.675	62.630
7	Bengkulu	1.436	1.480	1.527	1.576	1.618
8	Lampung	25.063	25.572	26.108	26.631	27.076
9	DKI Jakarta	251	252	253	254	255
10	Jabar	179.846	186.039	192.261	199.051	207.000
11	Jateng	211.277	221.854	233.464	245.845	257.344
12	DI. Yogya	33.277	35.284	37.509	39.732	41.769
13	Jatim	371.107	388.017	405.828	423.249	439.589
14	Bali	37.058	37.534	38.046	38.505	38.911
15	N T B	47.410	50.306	53.585	56.916	60.123
16	N T T	9.689	10.073	10.534	10.876	11.228
17	Kalbar	31.897	33.809	35.932	38.026	39.944
18	Kalteng	10.310	11.093	12.076	12.828	13.646
19	Kalsel	65.542	69.185	73.566	77.545	81.702
20	Kaltim	8.533	8.670	8.813	8.951	9.069
21	Sulut	11.203	11.728	12.305	12.868	13.380
22	Sulteng	9.078	9.664	10.349	10.983	11.613
23	Sulsel	73.857	77.889	82.492	86.662	90.570
24	Sultra	14.864	16.155	17.806	19.272	20.965
25	Maluku	3.494	3.812	4.219	4.556	4.931
26	Papua	2.034	2.048	2.063	2.076	2.089
27	Babel	5.476	5.863	6.332	6.716	7.109
28	Banten	79.184	84.200	89.846	95.461	100.762
29	Gorontalo	3.111	3.295	3.519	3.706	3.905
30	Malut	1.575	1.692	1.838	1.956	2.084
31	Kepri	4.599	4.847	5.111	5.387	5.626
32	Papua Barat	1.146	1.194	1.246	1.299	1.347
33	Sulbar	13.451	14.050	14.803	15.660	16.667
	Indonesia	1.506.836	1.574.017	1.647.973	1.720.833	1.791.609

Lampiran 18. Sasaran Produksi Susu Tahun 2010 – 2014

(ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	45	43	41	41	40
2	Sumut	1.884	1.801	1.749	1.724	1.692
3	Sumbar	1.796	2.160	2.562	3.017	3.564
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-
6	Sumsel	237	227	220	217	213
7	Bengkulu	236	284	337	396	468
8	Lampung	874	1.566	2.658	4.348	7.208
9	DKI Jakarta	10.140	11.174	12.272	13.488	14.836
10	Jabar	322.208	310.130	303.090	300.291	296.469
11	Jateng	153.099	184.173	218.418	257.206	303.906
12	DI Yogyakarta	10.481	10.553	10.720	10.991	11.246
13	Jatim	507.545	575.836	648.990	729.156	820.463
14	Bali	0	0	1	1	1
15	NTB	-	-	-	-	-
16	NTT	-	-	-	-	-
17	Kalbar	0	0	0	0	0
18	Kalteng	-	-	-	-	-
19	Kalsel	298	333	370	411	457
20	Kaltim	-	-	-	-	-
21	Sulut	-	-	-	-	-
22	Sulteng	-	-	-	-	-
23	Sulsel	4.873	5.862	6.952	8.186	9.673
24	Sultra	-	-	-	-	-
25	Maluku	-	-	-	-	-
26	Papua	-	-	-	-	-
27	Babel	-	-	-	-	-
28	Banten	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Malut	-	-	-	-	-
31	Kepri	-	-	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-	-
33	Sulbar	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.013.715	1.104.142	1.208.379	1.329.472	1.470.237

Lampiran 19. Kebutuhan Pembiayaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan Tahun 2010 – 2014

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN					TOTAL
									(Milyar Rp)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
6.	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	1. Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu)	1. Produksi daging meningkat 4,25% per tahun (ton)	2,252,515	2,321,284	2,412,938	2,513,248	2,660,464	940.08	2.244.69	2.598.88	2.858.77	3.138.66	11,781.08
			2. Produksi telur meningkat 4,42% per tahun (ton)	1,506,837	1,574,017	1,647,973	1,720,833	1,791,609						
			3. Produksi susu meningkat 9,74% per tahun (ton)	1,013,715	1,104,142	1,208,379	1,329,472	1,470,237						
		2. Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur)	1. Kontribusi daging sapi domestik terhadap total produksi daging nasional meningkat (%)	20.8	20.8	21.4	22.5	23.5						
			2. Kontribusi daging ayam buras terhadap total produksi daging nasional meningkat (%)	14.4	14.7	15.1	15.1	15.1						
		3. Meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak	Ketersediaan protein hewani asal ternak per kapita meningkat 3,58% per tahun (g/kapita/hr)	6.3	6.5	6.7	6.9	7.2						
		4. Tersedianya daging sapi domestik sebesar 90 persen	Produksi daging sapi domestik terhadap total penyediaan daging sapi nasional (%)	47.0	65.1	82.5	86.2	90.3						

Lampiran 20. Indikator Kinerja Utama Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010 - 2014

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
6.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (Prioritas Bidang)	Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit ternak	1 Peningkatan produksi perbenihan (ribu dosis semen)	5,078	5,875	7,160	7,976	8,820	147.50	934.13	1,016.60	1,041.29	1,168.01	4,307.52
			2 Peningkatan produksi bibit (ekor)	247,496	367,021	491,005	568,938	680,839						
			3 Peningkatan produksi embrio ternak (embrio)	400	490	580	640	700						
			4 Pengendalian sapi/kerbau betina produktif (klpk)	-	1,600	1,300	1,000	700						
6.2	Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)	Tercapainya peningkatan produksi dan populasi ternak	1 Peningkatan kelahiran ternak (juta ekor)	2,6	2,9	3,0	3,1	3,2	348.17	597.20	823.41	864.39	900.85	3,534.01
			2 Peningkatan usaha budidaya ternak (klpk)	1,602	1,249	1,244	1,577	1,685						

NO	PROGRAM/ KEGIA TAN PRIORI TAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
6.3	Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal	Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal	1. Pengembangan pakan ternak asal tumbuhan dan hewan (kelompok)	-	-	10	10	13	51,12	72,63	132,88	179,84	191,47	627,94
			2. Pengembangan hijauan pakan (klpk)	25	13 6	21 0	26 2	300						
			3. Pengembangan pakan olahan	50	16 5	14 5	15 2	172						
			4. Pengawasan mutu pakan dan pengembangan laboratorium	32	32	32	33	33						
6.4	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (Prioritas Nasional dan Bidang)	Terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis	1. Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ) Viral, Bakterial, Parasiter dan Gangguan Reproduksi (dosis)	6,560,000	7,812,460	7,964,752	8,976,802	10,133,173	187.10	230.49	362.11	377.95	412.41	1,570.06
2. Penguatan Otoritas Veteriner (unit)	30	30	37	37	37									

NO	PROGRAM/ KEGIAT AN PRIORIT AS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
6.5	Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan	1 Pengendalian penyakit zoonosis dan kesrawan serta pelayanan veteriner (unit)	511	511	513	516	518	68.80	68.80	111.44	200.00	243.05	692.10
			2 Unit Usaha produk pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet (paket)	84	92	108	88	90						
6.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan	Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis	Jumlah dokumen pendukung pencapaian swasembada daging sapi/kerbau dan penyediaan pangan hewani yang ASUH (perencanaan program, anggaran dan kerjasama; pemantauan dan evaluasi program/kegiatan, data/informasi ; kepegawaian, organisasi, hukum dan administrasi perkantoran; administrasi keuangan dan aset)	56	56	56	56	56	137.40	341.43	152.44	195.30	222.87	1,049.45
			Penyelesaian PP, Perpres, Kepmentan Turunan dari UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Keswan	1 2	10	1 0	1 5	1 5						
			Pelaksanaan Pendataan Ternak, Pendampingan Sensus Pertanian dan Pemeliharaan Data	-	1	1	1	1						



Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jl. Harsuno RM Nomor 3 Gedung C. Pasar Minggu Jakarta 12550
Kotak Pos 1108/WCS, Jakarta 12011
Telp/Faks : (021) 7815588-83, 78847319, Email : ditjenak@deptan.go.id
Website : <http://ditjenak.go.id>

